

Dakwah sebagai Instrumen Pemberdayaan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan Perkotaan

Abdul Wadud Nafis

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Email: abdulwadudnafis@gmail.com

Received: Maret 3, 2025. Accepted: April 4, 2026. Published: Mei 3, 2026

ABSTRACT

Urban poverty is a multifaceted phenomenon encompassing not only economic dimensions but also social, cultural, and spiritual aspects. Conventional structural-economic approaches often fail to address underlying non-material determinants. This study argues that Islamic da'wah, when reconstructed within a transformative paradigm, can serve as an effective instrument for social empowerment. This research employs a qualitative descriptive-analytical method based on an in-depth literature review. The findings indicate that the integration of three modes of da'wah *bil-lisān* (verbal communication), *bil-hāl* (practical action), and *bil-tamkīn* (empowerment) yields a holistic approach. This paradigm shifts the role of the *dā'i* from a preacher to a facilitator and change agent, while transforming da'wah institutions into community empowerment centers. The implementation includes community-based Islamic economic programs (such as BMT and productive ZIS), vocational and character education, and the strengthening of social capital through *majelis taklim* networks. Evidence from various da'wah institutions in Indonesia demonstrates positive impacts on capacity building, income generation, and the psycho-spiritual well-being of the urban poor. However, challenges such as urban individualism, limited human resource capacity, and institutional fragmentation persist. Therefore, this study recommends reorienting the curriculum of *dā'i* education, enhancing multi-stakeholder collaboration, leveraging digital technologies, and strengthening institutional frameworks to optimize the role of da'wah in promoting inclusive and sustainable urban welfare.

Keywords: Transformative Da'wah, Social Empowerment, Urban Poverty, Islamic Economics, Social Capital.

ABSTRAK

Kemiskinan perkotaan merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tetapi juga sosial, kultural, dan spiritual. Pendekatan struktural-ekonomi konvensional sering kali gagal menjangkau akar masalah non-material yang justru determinan. Penelitian ini berargumen bahwa dakwah Islam, ketika direkonstruksi dalam paradigma transformatif, dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang efektif. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif-analitis melalui studi literatur yang mendalam, penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara tiga modus dakwah *bil-lisān* (verbal), *bil-hāl* (aksi nyata), dan *bil-tamkīn* (pemberdayaan) menghasilkan pendekatan holistik. Paradigma ini menggeser peran dai dari preacher menjadi fasilitator dan change agent, serta mentransformasi lembaga dakwah menjadi pusat pemberdayaan komunitas. Implementasinya mencakup program ekonomi syariah berbasis komunitas (seperti BMT dan ZIS produktif), pendidikan vokasi dan karakter, serta penguatan modal sosial melalui jejaring majelis taklim. Studi kasus dari berbagai lembaga dakwah di Indonesia menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas, pendapatan, dan kesejahteraan psiko-spiritual masyarakat miskin kota. Namun, tantangan seperti individualisme urban, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, dan fragmentasi kelembagaan masih menghadang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reorientasi kurikulum pendidikan dai, kolaborasi strategis dengan multipihak, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan sistem kelembagaan untuk mengoptimalkan peran dakwah dalam membangun kesejahteraan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dakwah Transformatif, Pemberdayaan Sosial, Kemiskinan Perkotaan, Ekonomi Syariah, Modal Sosial.

INTRODUCTION

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan global yang paling kompleks dan persisten, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks perkotaan, kemiskinan tidak lagi dapat dipahami secara sempit sebagai keterbatasan pendapatan, melainkan sebagai fenomena multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap perumahan layak, sanitasi, air bersih, pendidikan, layanan kesehatan, serta partisipasi sosial dan politik (United Nations Human Settlements Programme [UN-Habitat], 2022). Laporan terbaru juga menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan semakin dipengaruhi oleh dinamika urbanisasi yang cepat, ketimpangan sosial, serta kerentanan terhadap krisis ekonomi dan perubahan lingkungan (World Bank, 2023). Selain itu, masyarakat miskin perkotaan sering mengalami keterasingan sosial, melemahnya kohesi komunitas, serta krisis identitas dan spiritualitas yang memperparah kondisi kerentanan mereka.

Pendekatan konvensional dalam penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung didominasi oleh paradigma struktural-ekonomi yang bersifat top-down dan berorientasi pada bantuan material. Pendekatan ini, meskipun memiliki kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan, sering kali belum mampu menyentuh akar persoalan yang bersifat non-material, seperti nilai, budaya, dan kapasitas internal masyarakat (World Bank, 2023). Dalam perspektif pembangunan kritis, kondisi ini menyebabkan masyarakat miskin diposisikan sebagai objek pembangunan (*passive beneficiaries*), bukan sebagai subjek aktif yang memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri (Chambers, 2017). Akibatnya, berbagai program penanggulangan kemiskinan kerap tidak berkelanjutan dan bahkan berpotensi menciptakan ketergantungan baru.

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, pendekatan pemberdayaan sosial (*social empowerment*) menjadi semakin relevan dalam wacana pembangunan kontemporer. Pemberdayaan sosial menekankan pada proses peningkatan kapasitas individu dan komunitas, penguatan akses terhadap sumber daya, serta perluasan ruang partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik (Ife, 2016). Dalam perkembangan terbaru, pendekatan ini juga menekankan pentingnya integrasi antara dimensi material dan non-material, termasuk nilai-nilai budaya dan spiritual, sebagai fondasi utama dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan (Narayan, 2022).

Dalam konteks masyarakat Muslim, dakwah Islam memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang bersifat transformatif. Dakwah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas penyampaian pesan keagamaan secara verbal, tetapi juga sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umat secara holistik (Aziz, 2021). Pendekatan dakwah yang integratif memungkinkan terjadinya sinergi antara dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, dakwah dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan keterkaitan antara keimanan dan tindakan sosial yang bersifat pemberdayaan. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. Āli 'Imrān [3]:133–134:

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kesalehan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk kepedulian sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, aktivitas berbagi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bagian integral dari praktik keagamaan dalam Islam.

Namun demikian, dalam praktik kontemporer, dakwah sering kali masih didominasi oleh pendekatan normatif dan seremonial yang berfokus pada aspek ritual-ibadah individu. Aktivitas dakwah cenderung berlangsung secara satu arah melalui ceramah di masjid atau majelis taklim, sehingga menjadikan jamaah sebagai pendengar pasif dan kurang memberikan dampak nyata terhadap perubahan sosial-ekonomi (Aly, 2015; Aziz, 2021). Kesenjangan antara nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan sosial dengan realitas kemiskinan yang dihadapi masyarakat menunjukkan perlunya rekonstruksi paradigma dakwah agar lebih kontekstual dan transformatif.

Pendekatan dakwah transformatif menawarkan paradigma baru yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses perubahan. Pendekatan ini mengintegrasikan dakwah bil-lisān (verbal), bil-ḥāl (aksi nyata), dan bil-tamkīn (pemberdayaan) dalam satu kerangka yang holistik. Dalam paradigma ini, dai tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai fasilitator, pendamping, dan agen perubahan sosial. Lembaga dakwah pun diarahkan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang mampu mengembangkan program-program berbasis kebutuhan komunitas, seperti ekonomi syariah berbasis komunitas, pendidikan vokasi, serta penguatan modal sosial melalui jejaring keagamaan.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam peran dakwah Islam sebagai instrumen pemberdayaan sosial dalam konteks kemiskinan perkotaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu dakwah melalui pendekatan interdisipliner, serta memberikan kontribusi praktis bagi para dai, lembaga dakwah, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pemberdayaan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *systematic literature review* (SLR) yang dipadukan dengan analisis konseptual. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur yang relevan serta membangun sintesis teoretis mengenai peran dakwah sebagai instrumen pemberdayaan sosial dalam konteks kemiskinan perkotaan. *Systematic literature review* dilakukan secara terstruktur melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis terhadap sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan relevan dengan fokus penelitian (Snyder, 2019; Xiao & Watson, 2019). Dalam konteks penelitian terkini, metode ini semakin banyak digunakan untuk mengintegrasikan temuan-temuan empiris dan konseptual secara komprehensif dalam bidang ilmu sosial dan keagamaan (Paul & Criado, 2020; Booth et al., 2022).

Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan analisis dokumen terhadap sumber-sumber sekunder berupa laporan tahunan, publikasi resmi, dan konten digital dari lembaga dakwah di Indonesia, seperti Dompet Dhuafa, BAZNAS, dan Pusat Dakwah Muhammadiyah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan ilustrasi empiris mengenai praktik dakwah pemberdayaan yang telah diimplementasikan, sehingga memperkaya kajian konseptual dengan data kontekstual.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumentasi. Sumber data primer meliputi teks-teks keagamaan utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi landasan normatif dalam analisis dakwah. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup buku akademik (buku babon), artikel jurnal ilmiah, prosiding, laporan penelitian, serta publikasi resmi dari lembaga terkait. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan aktualitas, terutama dengan mengutamakan publikasi dalam rentang tiga tahun terakhir untuk menjaga kebaruan analisis (World Bank, 2023; UN-Habitat, 2022).

Analisis data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Pertama, analisis isi tematik (*thematic content analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep kunci yang muncul dari berbagai literatur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan data secara sistematis sehingga menghasilkan konstruksi makna yang terstruktur (Braun & Clarke, 2021). Kedua, analisis hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits, dalam konteks permasalahan kemiskinan kontemporer. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman kontekstual dan relevansi makna teks terhadap realitas sosial saat ini (Ricoeur, 1981; Thiselton, 2009). Ketiga, analisis komparatif dilakukan untuk membandingkan berbagai model dan strategi dakwah pemberdayaan yang diterapkan oleh lembaga-lembaga dakwah, sehingga dapat diidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang relevan untuk dikembangkan.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai jenis literatur dan dokumen yang berbeda. Selain itu, validitas analisis juga diperkuat melalui proses *peer debriefing* secara implisit, yakni dengan mengaitkan hasil temuan penelitian dengan teori-teori yang telah mapan dalam bidang pemberdayaan sosial dan ilmu dakwah (Creswell & Poth, 2018). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang memadai sebagai karya ilmiah.

RESULTS AND DISCUSSION

Dakwah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Sosial Kontruksi Paradigmatik

Transformasi dakwah dalam konteks masyarakat urban menuntut adanya pergeseran paradigma yang signifikan, dari model dakwah konvensional yang bersifat verbalistik menuju pendekatan yang lebih transformatif dan berbasis pemberdayaan. Selama ini, praktik dakwah yang bertumpu pada komunikasi satu arah melalui khutbah dan ceramah (*bil-lisān*) cenderung kurang mampu menjawab kompleksitas persoalan sosial-ekonomi masyarakat perkotaan. Model dakwah seperti ini sering kali bersifat normatif, elitis, dan terpisah dari realitas keseharian jamaah, khususnya kelompok masyarakat miskin yang menghadapi tekanan ekonomi, keterbatasan akses, serta dinamika kehidupan urban yang pragmatis. Akibatnya, pesan-pesan keagamaan berisiko kehilangan relevansi sosialnya dan hanya berfungsi sebagai aktivitas seremonial (Aziz, 2021; World Bank, 2023).

Dalam konteks tersebut, dakwah transformatif hadir sebagai paradigma alternatif yang menempatkan agama tidak hanya sebagai sumber nilai, tetapi juga sebagai kekuatan perubahan sosial. Dakwah transformatif menekankan pentingnya keterlibatan langsung dalam persoalan umat serta orientasi pada solusi yang konkret dan berkelanjutan. Pendekatan ini menggeser posisi *mad'u* dari objek pasif menjadi subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Dengan demikian, dakwah tidak lagi sekadar menyampaikan kebenaran, tetapi juga memfasilitasi proses pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri (UN-Habitat, 2022).

Perubahan paradigma ini berimplikasi pada transformasi peran seorang dai. Seorang dai dalam kerangka dakwah pemberdayaan tidak cukup hanya memiliki kompetensi dalam ilmu keagamaan, tetapi juga perlu memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi komunitas, serta manajemen pemberdayaan menjadi penting untuk mendukung efektivitas dakwah dalam konteks kekinian (Ife, 2016). Dengan kompetensi tersebut, peran dai berkembang dari sekadar preacher (penceramah) menjadi fasilitator (fasilitator) dan change agent (agen perubahan). Dai berfungsi sebagai *murabbi* yang menanamkan nilai-nilai moral, sebagai *muḥarrrik* yang menggerakkan potensi komunitas, serta sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat dalam menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya perubahan dari dalam diri manusia, sebagaimana firman Allah SWT:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ"

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri." (QS. Al-Ra'd [13]:11).

Ayat ini menjadi landasan teologis bagi pendekatan pemberdayaan dalam dakwah, yang menekankan kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat. Sejalan dengan transformasi peran dai, lembaga dakwah juga dituntut untuk mengalami perubahan fungsi. Masjid dan majelis taklim tidak lagi hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi harus berkembang menjadi pusat pengembangan masyarakat (*community development center*) yang mampu mengintegrasikan fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, masjid idealnya menjadi ruang yang inklusif bagi berbagai aktivitas pemberdayaan, seperti pendidikan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Praktik ini sejalan dengan fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan politik umat (Aziz, 2021). Beberapa praktik kontemporer di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi ini memungkinkan masjid menjadi aktor strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program seperti pengembangan usaha mikro, pengelolaan zakat produktif, layanan kesehatan, dan pendidikan komunitas (BAZNAS, 2023; Dompot Dhuafa, 2022).

Implementasi dakwah pemberdayaan menuntut adanya strategi yang bersifat integratif dan partisipatif. Pertama, materi dakwah perlu disusun secara kontekstual dengan mengaitkan nilai-nilai

keagamaan dengan persoalan riil yang dihadapi masyarakat, seperti pengelolaan ekonomi keluarga, kewirausahaan syariah, kesehatan lingkungan, dan pendidikan anak. Pendekatan ini bertujuan agar ajaran agama tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pendekatan partisipatif menjadi kunci utama dalam dakwah pemberdayaan. Metode seperti diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), pemetaan aset komunitas (*asset-based community development*), serta perencanaan program berbasis kebutuhan masyarakat memungkinkan terciptanya rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap program yang dijalankan (Booth et al., 2022; Narayan, 2022). Ketiga, pemanfaatan struktur sosial-keagamaan yang telah ada, seperti jaringan masjid, takmir, dan majelis taklim, menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan. Struktur ini merupakan modal sosial yang kuat yang dapat dioptimalkan untuk mendorong aksi kolektif dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat perkotaan yang cenderung individualistik.

Dengan demikian, dakwah transformatif berbasis pemberdayaan sosial menawarkan pendekatan yang lebih relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan kemiskinan perkotaan. Integrasi antara nilai-nilai spiritual, strategi sosial, dan pendekatan ekonomi memungkinkan dakwah berperan sebagai instrumen perubahan yang tidak hanya menyentuh aspek keimanan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa dakwah memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam konteks masyarakat urban yang kompleks dan dinamis.

Implementasi Dakwah Pemberdayaan dalam Mengatasi Kemiskinan Perkotaan

Dakwah berbasis pemberdayaan sosial dalam konteks masyarakat perkotaan tidak dapat dilepaskan dari integrasi antara aspek ekonomi, pendidikan, dan penguatan modal sosial. Pendekatan ini menempatkan dakwah sebagai instrumen transformasi yang tidak hanya menyentuh dimensi spiritual, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap persoalan kemiskinan. Dalam praktiknya, salah satu bentuk implementasi yang paling menonjol adalah pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, seperti pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara produktif. Paradigma ini menggeser pola distribusi bantuan dari yang bersifat konsumtif menuju pendekatan produktif yang berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat, bahkan mendorong mobilitas sosial dari kategori prasejahtera menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik (BAZNAS, 2023; World Bank, 2023). Hal ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, keberadaan lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau koperasi syariah memainkan peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di perkotaan. Skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *muḍārabah* dan *musyārah* memberikan alternatif yang lebih adil dibandingkan sistem konvensional yang berbasis bunga. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah mampu meningkatkan inklusi keuangan serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat kecil, meskipun tantangan dalam aspek pendampingan dan literasi keuangan masih perlu diperkuat (Ascarya & Yumanita, 2022). Dengan demikian, integrasi antara nilai-nilai syariah dan praktik ekonomi mikro menjadi salah satu pilar penting dalam dakwah pemberdayaan.

Lebih lanjut, program pelatihan kewirausahaan dan keterampilan juga menjadi bagian integral dari strategi dakwah pemberdayaan. Berbagai organisasi keagamaan di Indonesia telah mengembangkan program pelatihan berbasis kebutuhan masyarakat, seperti keterampilan menjahit, tata boga, dan usaha kreatif lainnya. Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis (*hard skills*), tetapi juga membangun kepercayaan diri dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin perkotaan. Dalam perspektif pemberdayaan, peningkatan kapasitas individu merupakan langkah awal yang penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan (Ife, 2016; Narayan, 2022).

Di sisi lain, dakwah juga berperan dalam memperkuat dimensi pendidikan dan modal sosial masyarakat. Penyediaan layanan pendidikan non-formal, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD) dan bimbingan belajar gratis berbasis masjid atau lembaga dakwah, merupakan upaya strategis dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Pendidikan yang inklusif dan berbasis komunitas

memungkinkan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses terhadap pembelajaran yang berkualitas, sehingga meningkatkan peluang mobilitas sosial di masa depan (UN-Habitat, 2022). Selain itu, majelis taklim sebagai ruang interaksi sosial memiliki potensi besar dalam membangun jejaring kepercayaan (*trust*) dan solidaritas (*ukhuwwah islamiyyah*) di antara anggota masyarakat. Modal sosial yang terbentuk melalui interaksi keagamaan ini dapat dikonversi menjadi kekuatan kolektif dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti kelompok usaha bersama, arisan produktif, dan sistem simpan pinjam berbasis komunitas.

Nilai-nilai tolong-menolong dan solidaritas yang diajarkan dalam Islam menjadi fondasi penting dalam penguatan modal sosial tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mā'idah [5]:2:

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan".

Nilai ini kemudian diaktualisasikan dalam praktik gotong royong ekonomi yang memperkuat ketahanan sosial masyarakat perkotaan. Selain itu, dakwah juga berperan dalam pembentukan karakter melalui penanaman nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, disiplin, dan kerja keras. Nabi Muhammad SAW bersabda:

"إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ"

"Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." (HR. Ahmad).

Nilai-nilai ini menjadi fondasi moral yang penting dalam mendukung keberhasilan ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga etis dan berkelanjutan.

Implementasi dakwah berbasis pemberdayaan ini terbukti memberikan dampak yang bersifat multidimensional. Dari aspek ekonomi, berbagai program berbasis zakat produktif dan pembiayaan mikro syariah menunjukkan peningkatan pendapatan dan kepemilikan aset pada keluarga penerima manfaat. Dari aspek sosial, terjadi penguatan kohesi komunitas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif, serta perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui program berbasis masjid dan komunitas (BAZNAS, 2023; UN-Habitat, 2022). Sementara itu, dari aspek psiko-spiritual, proses pemberdayaan mampu meningkatkan rasa percaya diri, optimisme, serta kesadaran religius masyarakat. Individu yang sebelumnya berada dalam kondisi marginal mulai merasakan kembali martabat dan peran sosialnya dalam komunitas.

Dengan demikian, dakwah yang diimplementasikan secara integratif dan berbasis pemberdayaan sosial memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan perkotaan secara komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya menasar aspek material, tetapi juga memperkuat dimensi sosial dan spiritual yang menjadi akar dari kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, pengembangan model dakwah semacam ini perlu terus didorong melalui sinergi antara lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat, agar mampu menciptakan sistem pemberdayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas.

Kontribusi Dakwah Partisipatif terhadap Penguatan Indikator Ketahanan Sosial

Implementasi dakwah sebagai instrumen pemberdayaan sosial dalam konteks masyarakat perkotaan tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural maupun kultural yang kompleks. Karakteristik masyarakat urban yang cenderung individualistik, materialistik, dan memiliki mobilitas tinggi menjadi hambatan tersendiri dalam membangun partisipasi kolektif. Pola kehidupan yang serba cepat dan pragmatis sering kali mendorong masyarakat untuk lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi dibandingkan keterlibatan dalam kegiatan sosial-keagamaan. Selain itu, berkembangnya sikap skeptis terhadap lembaga keagamaan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti profesionalitas pengelolaan dan relevansi program, turut memperlemah efektivitas mobilisasi dakwah berbasis komunitas (UN-

Habitat, 2022; World Bank, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan dakwah konvensional tidak lagi memadai dan perlu beradaptasi dengan dinamika sosial masyarakat urban yang terus berubah.

Di sisi lain, tantangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor krusial dalam implementasi dakwah pemberdayaan. Tidak semua dai maupun pengelola lembaga dakwah memiliki kompetensi multidisipliner yang memadai, terutama dalam hal penguasaan ilmu sosial, manajemen program, serta keterampilan teknis pendampingan masyarakat. Padahal, dakwah dalam paradigma pemberdayaan menuntut kemampuan untuk tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga merancang dan mengelola program sosial yang berkelanjutan. Keterbatasan ini sering kali berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program, baik dalam hal perencanaan, monitoring, maupun evaluasi (Ife, 2016). Dalam konteks ini, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan berbasis integrasi ilmu agama dan ilmu sosial menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain tantangan SDM, aspek kelembagaan juga menjadi persoalan penting yang memengaruhi keberlanjutan dakwah pemberdayaan. Banyak lembaga dakwah masih dikelola secara tradisional dan bergantung pada figur tertentu, sehingga rentan terhadap disrupsi ketika terjadi perubahan kepemimpinan. Keterbatasan dalam sistem manajemen modern, transparansi keuangan, serta diversifikasi sumber pendanaan sering kali menjadi penghambat dalam pengembangan program jangka panjang. Ketergantungan pada donasi spontan tanpa adanya model pembiayaan yang berkelanjutan juga membuat program pemberdayaan sulit untuk berkembang secara optimal (BAZNAS, 2023). Oleh karena itu, transformasi kelembagaan menuju tata kelola yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem menjadi hal yang sangat penting.

Tantangan lain yang tidak kalah signifikan adalah adanya dinamika politik dan ideologi yang dapat memengaruhi arah dakwah. Dalam beberapa kasus, aktivitas dakwah terjebak dalam kepentingan politik praktis atau dicurigai sebagai bagian dari agenda ideologis tertentu, sehingga mengurangi kepercayaan publik dan menghambat misi pemberdayaan sosial yang inklusif. Situasi ini menuntut lembaga dakwah untuk menjaga independensi, profesionalitas, serta fokus pada tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas tanpa diskriminasi.

Meskipun demikian, di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dakwah pemberdayaan secara lebih efektif dan inovatif. Salah satu peluang strategis adalah penguatan kolaborasi multipihak (*pentabelix*), yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini memungkinkan terjadinya sinergi sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan, keahlian, maupun jaringan, sehingga program pemberdayaan dapat dijalankan secara lebih terintegrasi dan berdampak luas (Booth et al., 2022). Dalam konteks ini, lembaga dakwah dapat berperan sebagai penghubung antara nilai-nilai keagamaan dengan praktik pembangunan sosial yang inklusif.

Selain itu, perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi dakwah untuk menjangkau masyarakat urban secara lebih luas dan efektif. Tingginya penetrasi internet dan penggunaan media sosial memungkinkan penyebaran konten dakwah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga edukatif dan pemberdayaan. Platform digital seperti YouTube, podcast, dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi tentang kewirausahaan, literasi keuangan syariah, serta pengembangan kapasitas diri. Lebih lanjut, inovasi dalam bidang teknologi finansial syariah (*Islamic fintech*) memungkinkan optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara transparan dan efisien, serta mendukung pembiayaan usaha mikro berbasis komunitas (Ascarya & Yumanita, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara dakwah dan teknologi digital dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan jangkauan dan dampak pemberdayaan.

Pengembangan model bisnis sosial (*social enterprise*) juga menjadi salah satu inovasi strategis yang relevan dalam mendukung keberlanjutan lembaga dakwah. Melalui model ini, lembaga dakwah dapat mendirikan unit usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tujuan sosial, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keuntungan dari usaha tersebut dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial dan operasional lembaga, sehingga menciptakan kemandirian finansial. Dalam perspektif ekonomi Islam, model ini dikenal sebagai *Islamic Social Enterprise* yang mengintegrasikan prinsip bisnis dengan nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatn sosial (Narayan, 2022). Pendekatan ini menjadi solusi alternatif dalam mengatasi keterbatasan pendanaan yang sering dihadapi oleh lembaga dakwah.

Lebih jauh, lembaga dakwah juga memiliki potensi untuk berperan dalam advokasi kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat miskin. Dengan basis massa yang kuat serta legitimasi moral yang tinggi, lembaga dakwah dapat menjadi *pressure group* yang mendorong lahirnya kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. Peran ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, dakwah tidak hanya berfungsi pada level mikro melalui pemberdayaan individu dan komunitas, tetapi juga pada level makro melalui pengaruh terhadap kebijakan publik.

Secara keseluruhan, meskipun dakwah pemberdayaan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, peluang untuk mengembangkannya tetap terbuka luas melalui inovasi, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Integrasi antara pendekatan keagamaan, sosial, dan teknologi menjadi kunci utama dalam menciptakan model dakwah yang relevan, efektif, dan berkelanjutan dalam menghadapi problem kemiskinan perkotaan yang multidimensional.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa dakwah Islam memiliki potensi yang sangat kuat untuk berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan sosial dalam mengatasi kemiskinan perkotaan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Potensi tersebut akan lebih optimal apabila dakwah direkonstruksi dalam paradigma transformatif-integratif yang tidak hanya menekankan pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga pada upaya nyata dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Integrasi antara dakwah bil-lisān, bil-ḥāl, dan bil-tamkīn menjadi kunci dalam menciptakan pendekatan dakwah yang holistik, di mana kesadaran spiritual, keteladanan sosial, dan program pemberdayaan berjalan secara sinergis.

Implementasi dakwah berbasis pemberdayaan yang diwujudkan melalui program ekonomi syariah, pendidikan vokasi dan karakter, serta penguatan modal sosial terbukti mampu memberikan dampak yang nyata. Dampak tersebut tidak hanya terlihat pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga pada penguatan solidaritas sosial, peningkatan partisipasi masyarakat, serta tumbuhnya kesadaran spiritual dan rasa percaya diri di kalangan masyarakat miskin perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah yang dirancang secara kontekstual dan aplikatif memiliki peran strategis dalam menjawab persoalan kemiskinan secara lebih menyeluruh.

Namun demikian, optimalisasi peran dakwah sebagai instrumen pemberdayaan sosial masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, maupun karakteristik masyarakat urban yang dinamis. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi para dai, memperkuat sistem kelembagaan dakwah, serta mengembangkan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, dakwah tidak hanya menjadi sarana penyampaian nilai-nilai keagamaan, tetapi juga mampu berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

BIBLIOGRAPHY

- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2022). The role of Islamic microfinance and fintech in poverty alleviation. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 8(2), 251–276.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2023). *Laporan kinerja zakat nasional 2023*.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2022). *Systematic approaches to a successful literature review* (2nd ed.). Sage.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage.
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Practical Action Publishing.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Freire, P. (2000). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum.

- Ife, J. (2016). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.
- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. ACTA Publications.
- Narayan, D. (2022). *Poverty, social capital, and development*. World Bank Publications.
- Paul, J., & Criado, A. R. (2020). The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know? *International Business Review*, 29(4), 101717.
- Qardhawi, Y. (2000). *Fikih zakat*. Litera AntarNusa.
- Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, 15(2), 121–148.
- Ravallion, M. (2016). *The economics of poverty: History, measurement, and policy*. Oxford University Press.
- Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics and the human sciences*. Cambridge University Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Thiselton, A. C. (2009). *Hermeneutics: An introduction*. Eerdmans.
- United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). (2022). *World cities report 2022: Envisaging the future of cities*.
- Wahid, A. (2011). *Dakwah sosial: Meretas jalan perubahan*. Erlangga.
- World Bank. (2023). *Poverty and shared prosperity 2023: Ending poverty on a livable planet*.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112.